

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.¹

Dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI.

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.²

Sedangkan menurut Molengraf yang dinamakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang,

¹ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern; Edisi 3*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 12

² Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 15

menyerahkan barang-banrang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.³

Dari beberapa pengertian perusahaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan meliputi:

1. Badan Usaha

Bentuk legalitas sebuah badan usaha adalah mendapatkan ijin dari negara dengan dibuatnya kata pendirian perusahaan yang disahkan oleh institusi terkait. Setelah disahkan oleh instansi terkait, maka badan usaha tersebut mendapatkan status badan hukum.

2. Kegiatan dalam Bidang Usaha atau Ekonomi

Kegiatan dalam bidang ekonomi ini, bisa berupa menghasilkan barang (produk) dan bisa berupa jasa. Kedua bentuk kegiatan ekonomi ini tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum.

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi *input* menjadi *output*. M.N Siddiqi berpendapat, bahwa produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.⁴

³ *Ibid*, 17

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 230

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer.

Menurut Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi bahwa produksi merupakan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang dan jasa.⁵

Kemudian menurut Adi Warman Karim, produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat berkaitan bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.⁶

Menurut Yusuf Qardawi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.⁷

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan

⁵ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 11

⁶ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 102

⁷ Yusuf Qardawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robban Press, 1997), 51

agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik, seperti (QS. Al-Qashash: 73):

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

“Supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam.⁸ Produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada hakikatnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Sehingga produksi adalah menciptakan manfaat bukan menciptakan materi. Maksudnya adalah bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan.⁹

3. Terus-menerus

Maksud dari terus menerus ini adalah kegiatan ekonomi tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian maupun dalam surat ijin usaha perusahaan.

⁸ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 111

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 56

4. Terang-terangan

Maksud dari terang-terangan adalah dengan adanya pengakuan dari pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian serta diterbitkannya surat izin usaha.

5. Mencari Keuntungan atau Laba

Perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, asalkan perolehan keuntungan tersebut legal dan sesuai dengan ketentuan UU.

6. Melakukan Pembukuan

Pembukuan dalam perusahaan merupakan kewajiban yang dilakukan perusahaan, karena telah diatur dalam KUHD, namun istilah pembukuan ini berubah menjadi dokumen perusahaan setelah keluar UU No. 8 Tahun 1997. Adapun dokumen perusahaan terdiri dari 2 macam:

- a. Dokumen keuangan, terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
- b. Dokumen lainnya, terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.¹⁰

¹⁰ Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 16-17

Adapun manfaat perusahaan bagi kehidupan manusia yaitu:

1) Penyedia produk (barang dan jasa)

Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum/khusus, yang mana setiap pengguna produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah/nominal uang tertentu.

2) Penyedia lapangan kerja

Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

3) Media investasi

Bagi kalangan pebisnis, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan.

4) Media mencari keuntungan

Perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan/pemegang saham.

5) Pemasukan negara

Dalam aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada negara. Beberapa jenis pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada negara yaitu pajak badan usaha, pajak

penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor dan berbagai macam pajak lainnya.

6) Peningkat cadangan devisa

Manfaat perusahaan yang terakhir adalah sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia.¹¹

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pada dasarnya agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti.¹² Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Secara lebih rinci Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.¹³

¹¹ *Ibid.*, 19

¹² Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pemberdayaan Masyarakat Islam: dari Ideologi Strategi sampai Tradisi* (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2001), 41.

¹³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung : Alfabeta, 2013), 51.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Bambang Rudito, memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁴

Tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya, Allah SWT berfirman¹⁵:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: "tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat." (QS. Ibrahim; 24-25)¹⁶

¹⁴ N. Oneng Nurul Bariyah, Ed, *Total Management Zakat : Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi* (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), 55.

¹⁵ Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat* (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2005), 38.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 602

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kemiskinan ilmu.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁷

Menurut Syahrin Harahap dalam buku Lili Bariadi, pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat miskin ada tiga:¹⁸

- a. Pendekatan parsial kontinu, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara langsung, hal ini diberikan terutama kepada orang yang tak sanggup untuk bekerja sendiri, misalnya: orang cacat abadi, lansia, orang buta dll.
- b. Pendekatan struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar masyarakat dapat mengatasi kelemahannya. Bahkan dari yang dibantu diharapkan dapat turut membantu. Terutama diberikan kepada mereka status melalui perwujudan dan

¹⁷ Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat.*, 229

¹⁸ Lili Bariadi dkk. *Zakat dan Wirausaha* (Ciputat: CED, 2005), 62

komitmen kemitraan yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan.

- c. Mengupayakan perubahan dan suntikan dana (zakat, infak, dan shadaqah) secara struktural terhadap masyarakat yang aktif dan terampil dalam mengembangkan usaha, baik skala kecil dan menengah. Pemberdayaan pada level ini telah mencapai tahap partisipatoris.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan untuk memperluas pilihan masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Tahap-tahap pemberdayaan terdapat enam yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan terarah dan tepat sasaran. Langkah

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), 32

pertama, melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan. Langkah kedua, adalah melakukan analisis pihak terkait (*stakeholder analysis*), yang bertujuan untuk menjajaki kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi aktif pihak terkait. Langkah ketiga, adalah membuat rancangan dan *design* program yang logis sesuai dengan kebutuhan. Langkah keempat, melakukan identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan. Langkah kelima, implementasi program pemberdayaan masyarakat, lembaga pelaksana program terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan bagi para pendamping program. Langkah keenam, melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler. Hal ini untuk memantau perkembangan kegiatan program, permasalahan atau hambatan, dan tingkat hasil-hasil yang ditargetkan.²⁰

3. Upaya Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Isbandi Rukminto Adi, upaya untuk memberdayakan umat/masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu:²¹

- a. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.

²⁰ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 172-173.

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: UI Press, 2003), 237.

- b. Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
- c. Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.

4. Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang ‘penting’ yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari umat, oleh umat dan untuk kepentingan umat.

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:²²

- a. Motivasi: dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan: peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan

²²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK* (Bandung: Alfabeta, 2013), 170-171

keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.

- c. Manajemen diri: setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.
- d. Mobilisasi sumberdaya: untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring: pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

5. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

- b. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan mampu memenuhi ciri-ciri dari pemberdayaan yang baik. Ciri-ciri program pemberdayaan yang baik yaitu:

- a. Transparan (*transparent*): semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- b. Bertanggung jawab (*accountable*): perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- c. Menguntungkan (*profitable*): semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.

- d. Berlanjut (*sustainable*): proses dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.
- e. Dapat diperluas (*replicable*): program ini dapat diterapkan juga ke kelompok di wilayah lainnya.²³

6. Dampak Pemberdayaan

Dampak merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan. Kegiatan tersebut adalah pembangunan ekonomi. Berbicara mengenai dampak, dampak memiliki dua sifat yaitu primer dan sekunder. Dampak primer adalah perubahan lingkungan yang terjadi disebabkan secara langsung melalui suatu kegiatan. Dampak primer meliputi dampak terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dampak sekunder yaitu perubahan lingkungan yang terjadi secara tidak langsung, merupakan keberlanjutan dari dampak primer tersebut. Dari kedua dampak diatas akan terjadi dampak yang sifatnya positif dan negatif.²⁴

Adapun dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi diantaranya adalah:²⁵ Dampak positif pembangunan ekonomi yaitu, memperlancar dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya, tidak terencana dengan baik pembangunan akan mengakibatkan

²³ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Depdikbud, 1995), 87-88

²⁵ <http://mdk16.wordpress.com/tag/dampak-positif-dan-negatif-dari-pembangunan-ekonomi/> diakses pada 27 November 2017

kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.

Tepatnya potensi yang lebih besar dalam menggunakan sumberdaya, inisiatif, dan tenaga ahli lokal untuk mengembangkan industri lokal baru yang akan dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang ada dimasyarakat lokal. Hal ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian beserta penaksiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tentu dan kemudian memutuskan apa jenis industri baru yang mungkin berhasil.²⁶

²⁶ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Commonity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), 425